

**TAHUN  
2018**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH (LKIP)**

**DINAS  
PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BONTANG**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan petunjukNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2018.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai salah satu upaya konkrit mewujudkan Transparansi atas kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan segala keterbatasan pada laporan kinerja ini diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan dan bermanfaat sebagai evaluasi bagi Pemerintah Kota Bontang dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

Bontang, Januari 2019

Kepala,

**Puguh Harjanto, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP. 19790810 199802 1 001



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 guna melaporkan capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang selama Tahun 2018.

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang secara bertahap berusaha mencapai 5 (lima) indikator sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi pencari kerja
2. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan
3. Meningkatnya jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama
4. Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing
5. Meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi perijinan

Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, maka secara umum sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator kinerja, namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang memerlukan dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan instansi terkait agar tercapai hasil yang optimal.



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>v</b>

### **Bab I PENDAHULUAN**

A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi .....	6
D. Sumber Daya Manusia .....	8
E. Aspek Strategis Organisasi.....	11
F. Permasalahan Utama .....	11
G. Sarana dan Prasarana Kerja .....	12

### **Bab II PERENCANAAN KINERJA..... 13**

A. Perencanaan Strategis .....	13
B. Indikator Kinerja Utama .....	16
C. Perjanjian Kinerja.....	18
D. Rencana Anggaran Tahun 2018.....	19

### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 21**

A. Laporan Hasil Evaluasi LKIP Tahun Sebelumnya .....	21
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	22
C. Analisis Capaian Kinerja .....	26
D. Realisasi Anggaran.....	37

### **Bab IV PENUTUP ..... 40**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....7



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan Dan Tingkat Pendidikan .....	8
Tabel 1.2 Rekapitulasi Barang Inventaris Milik Daerah Tahun 2018 .....	12
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja DPMTKPTSP .....	15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DPMTKPTSP Tahun 2018 .....	16
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja DPMTKPTSP Tahun 2018 .....	18
Tabel 2.4 Anggaran DPMTKPTSP Tahun 2018 .....	20
Tabel 3.1 Akumulasi Penilaian terhadap Seluruh Komponen SAKIP .....	21
Tabel 3.2 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah .....	22
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .....	23
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2018 .....	24
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja DPMTKPTSP Sasaran 1 .....	26
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Sebelumnya .....	26
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra ....	27
Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja .....	28
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja DPMTKPTSP Tahun 2018 Sasaran 2 .....	28
Tabel 4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Sebelumnya .....	29
Tabel 4.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra ....	29
Tabel 4.3 Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja .....	29
Tabel 4.4 Capaian Indikator Kinerja DPMTKPTSP Tahun 2018 Sasaran 3 .....	30
Tabel 4.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Sebelumnya .....	30
Tabel 4.6 Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra ....	31
Tabel 4.7 Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja .....	31
Tabel 4.8 Capaian Indikator Kinerja DPMTKPTSP Tahun 2018 Sasaran 4 .....	32
Tabel 4.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Sebelumnya .....	33
Tabel 5.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra ....	34
Tabel 5.2 Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja .....	34
Tabel 5.3 Capaian Indikator Kinerja DPMTKPTSP Tahun 2018 Sasaran 5 .....	34



Tabel 5.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya .....	36
Tabel 5.5 Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra ..	37
Tabel 5.6 Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja .....	37
Tabel 5.7 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	37
Tabel 5.8 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan .....	38
Tabel 5.9 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan .....	39





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Dasar pembentukan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang adalah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta didukung dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa bentuk organisasi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja.

#### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Tugas Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah berdasar pada Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi yang melekat pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP sebagai bagian Pemerintah Kota Bontang adalah Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Pelaksanaan





evaluasi pelaporan sesuai lingkup tugasnya, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya.

Adapun uraian tugas organisasi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan dengan fungsi jabatan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang penanaman modal, ketenagakerjaan dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup;
3. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang penanaman modal, ketenagakerjaan dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
7. Pelaksanaan tugas lain-lain

#### 2. Sekretaris

Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas merupakan tugas dari sekretaris, sedangkan fungsinya :



1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan SKPD;
3. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
4. Pengoordinasian; pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan;
5. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
6. Pengoordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
7. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian;
8. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor;
9. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
10. Pelaksanaan tugas lain-lain.

### 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial

Tugas pokok melaksanakan urusan hubungan industrial dengan fungsi jabatan :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;



3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengupahan dan persyaratan kerja;
  4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial;
  5. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
  6. Pelaksanaan tugas lain-lain.
4. Kepala Bidang Pelatihan Produktifitas dan penempatan tenaga kerja
- Tugas pokok melaksanakan urusan Pelatihan Produktifitas dan penempatan tenaga kerja dengan fungsi jabatan :
1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
  2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelatihan produktifitas dan pemagangan;
  3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan informasi pasar kerja;
  4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penempatan dan bimbingan jabatan;
  5. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
  6. Pelaksanaan tugas lain-lain.
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



Tugas pokok menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu meliputi aspek administrasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta penanganan sistem pengaduan, dengan fungsi jabatan :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pelayanan perizinan dan non perizinan dasar;
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha;
4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaduan, pengendalian data dan pelaporan;
5. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
6. Pelaksanaan tugas lain-lain.

#### 6. Kepala Bidang Penanaman Modal

Tugas pokok melaksanakan urusan penanaman modal dengan fungsi jabatan :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan promosi dan fasilitasi penanaman modal;
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan penanaman modal;



4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan data, sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
5. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
6. Pelaksanaan tugas lain-lain.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Hubungan Industrial :
  - a. Seksi Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  - b. Seksi Pengupahan Dan Persyaratan Kerja
  - c. Seksi Kelembagaan Dan Pemasyarakatan Hubungan Industri
4. Bidang Pelatihan, Produktivitas Dan Penempatan Tenaga Kerja
  - a. Seksi Pelatihan, Produktivitas Dan Pemawangan
  - b. Seksi Informasi Pasar Kerja
  - c. Seksi Penempatan Dan Bimbingan Jabatan
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
  - a. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dasar
  - b. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Usaha



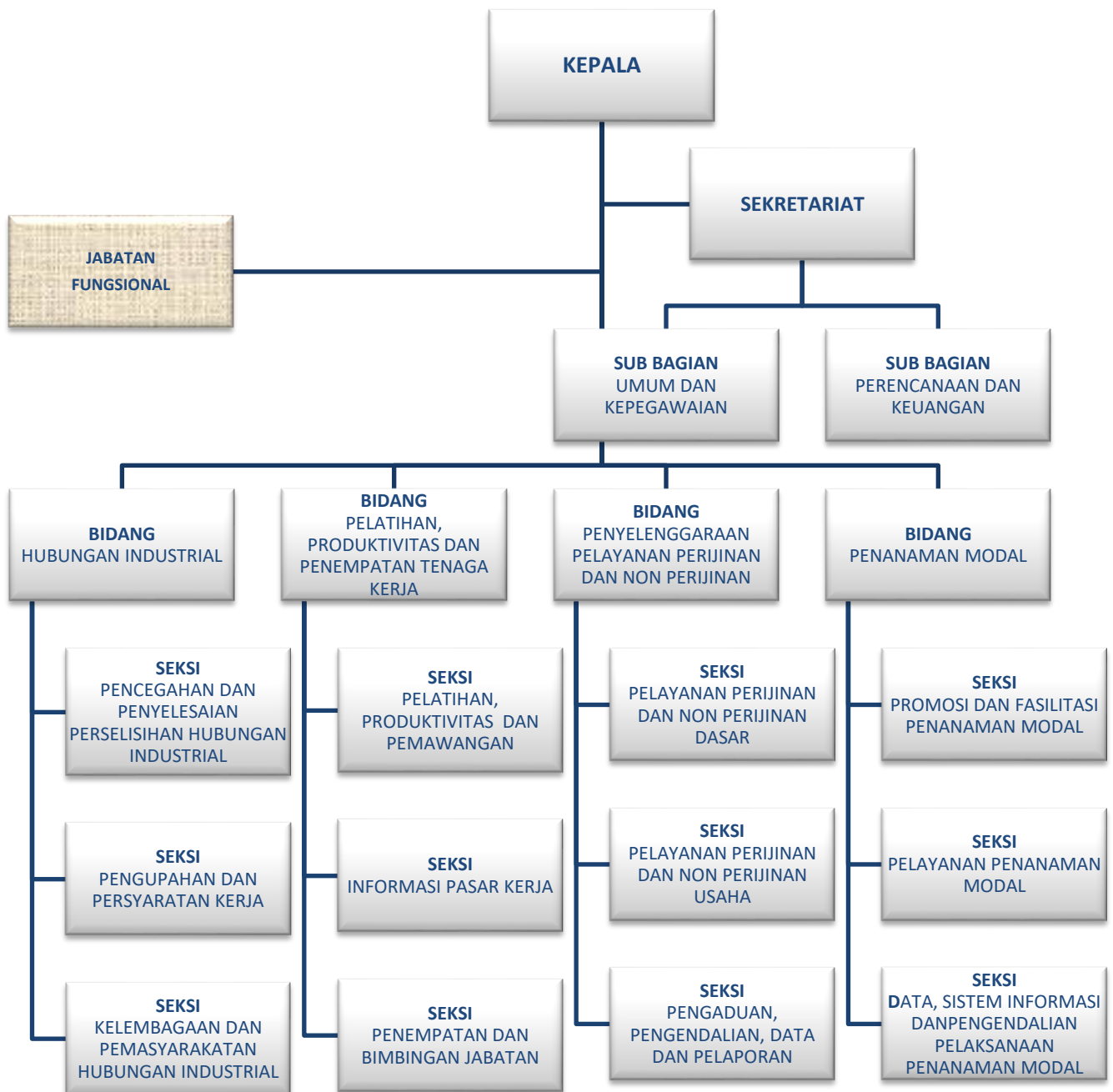
c. Seksi Pengaduan, Pengendalian, Data Dan Pelaporan

6. Bidang Penanaman Modal yang membawahi :

a. Seksi Promosi Dan Fasilitasi Penanaman Modal

b. Seksi Pelayanan Penanaman Modal

c. Seksi Data, Sistem Informasi Dan pengendalian Pelaksanaan  
Penanaman Modal



Gambar 1.1 Struktur Organisasi



#### D. SUMBER DAYA APARATUR

Susunan kepegawaian sampai dengan 30 Desember 2018, jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Bontang sebanyak 78 Orang, 20 orang pejabat struktural, 4 orang jabatan fungsional dan 54 orang pegawai non structural.

Jabatan fungsional terdiri atas 2 orang pengantar kerja ahli pertama, 1 pranata komputer terampil pelaksana dan 1 pranata humas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Tingkat Pendidikan**

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1				1					
Sekretaris	1		1				1					
Kabid. Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan	1		1					1				
Kabid. Penanaman modal		1	1					1				
Kabid. Hubungan Industrial	1		1				1					
Kabid. Pelatihan produktivitas dan tenaga kerja	1		1				1					
Kasi. Informasi dan pasar kerja	1		1				1					
Kasi Pengupahan dan persyaratan kerja		1		1				1				
Kasi.pelayanan dan penanaman modal		1	1				1					
Kasi. Pengaduan pengendalian dan pelaporan	1			1						1		
Kasi penempatan dan bimbingan jabatan	1			1				1				
Kasi pelayanan perijinan dan perijinan non dasar		1	1				1					
Kasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan industrial	1			1				1				





Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Kasi pelatihan produktivitas dan pemagangan	1			1				1				
Kasi data sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan		1		1				1				
Kasi pelayanan perijinan dan non perijinan usaha		1		1			1					
Kasi promosi dan fasilitasi penanaman modal		1		1				1				
Kasubbag perencanaan dan keuangan	1			1				1				
Kasi informasi dan pasar kerja	1			1				1				
Kasubbag umum dan kepegawaian		1		1				1				
Verifikator keuangan		1		1				1				
Pengantar kerja	1	1		2				2				
Pengelola data IPK dan bursa kerja		1		1				1				
Mediator hubungan industrial		1		1				1				
Analisis kelembagaan kursus dan pelatihan		1		1				1				
Analisis perijinan	1	1		2				2				
Analisis pengaduan masyarakat	1			1				1				
Pengevaluasi acuan standar		1		1				1				
Pengadministrasi penerimaan		1		1				1				
Pengadministrasian pengajuan persyaratan kerja	1			1					1			
Pengadministrasi keuangan		1		1					1			
Pengadministrasi umum		1		1				1				
Pranata komputer terampil		1			1					1		
Penyusun rencana kegiatan dan anggaran	1			1						1		
Penata laporan keuangan		1		1					1			
Pranata Hubungan masyarakat		1			1					1		
Pengadministrasi kepegawaian		1			1			1				
Mediator hubungan industrial	1			1				1				



Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Pengelola kelembagaan HI		1		1				1				
Pengelola perijinan	4			1	3			1		3		
Pengelola data aplikasi		1			1			1				
Pengelola pemanfaatan barang milik daerah		1			1					1		
Pengadministrasi SP/SB	1				1					1		
Analisis tenaga kerja	1				1				1			
Petugas ukur	1				1					1		
Pengolah data penanaman modal	1				1					1		
Pengelola data lembaga kursus dan pelatihan	1				1					1		
Pengolah data tenaga kerja	1				1					1		
Pengelola perijinan penanaman modal		1			1					1		
Pengelola data bidang	3	1						1	1	2		
Pengolah data kerja		1						1				
Customer service		2						2				
Pengelola sistem informasi	1								1			
Administrasi pengelola pelatihan lapangan		1							1			
Penyusun bahan aplikasi	1									1		
Pengadministrasi umum		1								1		
Penyusun perjanjian kerjasama	1									1		
Pengadministrasi rekrutmen dan penempatan		1								1		
Pengolah daftar hadir dan SPPD	1									1		
Pengelola data aplikasi	1									1		
Pengolah data keuangan		1								1		
Pengadministrasi perijinan penanaman modal	1									1		
Pengelola data KNI	1									1		
portir	1									1		
Pengelola data kepegawaian		1								1		
Pengolah data kehumasan		1								1		
Petugas keamanan	2									2		
Penjaga malam	1									1		
<b>Jumlah PNS</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>15</b>			<b>8</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	
<b>Jumlah Honor</b>	<b>14</b>	<b>10</b>						<b>4</b>	<b>3</b>	<b>17</b>		
<b>Jumlah PNS + Honor</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>15</b>			<b>8</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	



## **E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP ikut berperan besar dalam mendorong Pemerintah Kota Bontang mencapai tujuan melalui kerjasama dengan mitra-mitra strategis untuk membantu pertumbuhan perekonomian di Kota Bontang.

Berdasarkan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP, tugas dan fungsi pelayanan dititikberatkan pada 4 (empat) bidang yaitu : Bidang Hubungan Industrial, Bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Penanaman Modal.

Dengan cakupan tersebut dari perizinan penanaman modal, perizinan dasar dan perizinan usaha, penempatan tenaga kerja bahkan urusan penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial, menjadikan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP menjadi salah satu pendorong dalam berjalannya perekonomian khususnya di Kota Bontang.

## **F. PERMASALAHAN UTAMA**

Realisasi dan capaian target di tahun 2018 masih pada tahapan memulai, baik dalam organisasi maupun perencanaan Renstra. Faktor yang sangat nampak pada pelaksanaan kegiatan rutin maupun kegiatan pendukung yaitu kendala di lapangan, diantaranya : terbatasnya anggaran khususnya alokasi dari APBD yang tersedia untuk merealisasikan rencana kegiatan yang mendukung pelayanan perizinan penanaman modal dan pelayanan ketenagakerjaan.



## G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Sarana dan prasarana kerja berdasarkan data rekapitulasi barang inventaris milik daerah tahun 2018, tercatat aset Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Barang Inventaris Milik Daerah Tahun 2018**

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp.)
<b>1.</b>	<b>Mesin dan Peralatan</b>	<b>992 Unit</b>	<b>6.406.508.049</b>
	a. Alat-alat angkutan	30 unit	1.908.829.372
	b. Alat-alat bengkel dan alat ukur	13 unit	331.424.092
	c. Alat-alat kantor dan rumah tangga	780 unit	3.214.786.345
	d. Alat-alat studio dan komunikasi	60 unit	214.663.937
	e. Alat-alat laboratorium	22 unit	730.887.103
<b>2.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>9 Unit</b>	<b>14.224.878.037</b>
	a. Bangunan ex. Kantor walikota	1 unit	12.216.588.394
	b. Perbaikan halaman parkir	1 unit	1.640.391.500
	c. Ruangans Genset	1 unit	24.650.000
	d. Tempat parkir 1	1 unit	45.131.000
	e. Tempat Parkir 2	1 unit	43.500.000
	f. Bangunan mushola	1 unit	186.375.000
	g. Tempat wudhu	1 unit	12.941.000
	h. Pos jaga kantor walikota	1 unit	3.480.000
	i. Tempat parkir	1 unit	51.821.143
<b>3</b>	<b>Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	<b>3 unit</b>	<b>2.392.453.248</b>
	a. Instalasi	2 unit	2.188.778.240
	b. Jaringan	1 unit	203.675.008
<b>TOTAL</b>		<b>917 unit</b>	<b>23.017.922.134</b>



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bontang terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu



Satu Pintu Kota Bontang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Visi**

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang kondisi ideal yang diinginkan *stakeholders* Kota Bontang pada masa mendatang. Visi Kota Bontang 2016-2021 adalah:

"Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"

### **2. Misi**

Misi merupakan tekad yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan misi pembangunan sebagai berikut :

- a. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
- b. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup
- c. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritime

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 - 2021 sebanyak 5 sasaran strategis.

Tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu**  
**Pintu Kota Bontang**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan penempatan pencari kerja  <b>Indikator :</b> Jumlah pencari kerja yang dilatih dan ditempatkan	1. Meningkatnya Kompetensi pencari kerja	1. Persentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	2,56 %	5,26%	8,33%	12,11%	17,22%	24,96%
		2. Meningkatnya Jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitasi penempatan	2. Pencari kerja yang ditempatkan	13,99%	16,79%	17,63%	18,51%	19,43%	20,4%
2.	Menciptakan sistem hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan  <b>Indikator :</b> Menurunnya jumlah perselisihan industrial Kota Bontang	1. Meningkatkan jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama	1. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama	65%	65%	70%	80%	85%	90%
3.	Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing  <b>Indikator :</b> Jumlah investor	1. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi di Kota Bontang	1. Jumlah Investor (PMDN)	10	11	12	11	12	12
			2. Jumlah Investor (PMA)	11	11	12	12	13	13





NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3. Jumlah Nilai (PMDN) Rp.x(000.000,-)	805.555	861.943	922.279	986.839	1.055.918	1.129.832
			4. Jumlah Nilai (PMA) \$.x(000,-)	297.017	317.808	340.054	363.859	389.328	416.581
			5. Jumlah peraturan yang mendukung iklim investasi	3	3	0	1	0	1
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik <b>Indikator</b> : Nilai IKM	1. Meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi Perizinan	1. Jumlah PAD dari retribusi Perizinan Rp. (000.000,-) 2. Nilai IKM	3.811 77	3.168 78	3.202 79	3.412 79	3.633 80	4.138 80

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	meningkatnya kompetensi pencari kerja	persentase jumlah pencari kerja yang di latih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	persen		$\frac{\Sigma \text{Pencari kerja dilatih}}{\Sigma \text{Pencari kerja terdaftar}} \times 100$	Seksi Pelatihan, produktivitas dan pema Gangan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
2	meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan	persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen		$\frac{\Sigma \text{Pencari kerja ditempatkan}}{\Sigma \text{Pencari kerja terdaftar}} \times 100$	Seksi Informasi pasar Kerja
3	meningkatnya jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	persen		$\frac{\Sigma \text{penyelesaian dengan PB}}{\Sigma \text{Perselisihan Industrial}} \times 100$	Bidang Hubungan Industrial
4	Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing	jumlah investor berskala nasional (PMDN)	jumlah investor		Jumlah Investor PMDN	Bidang Penanaman Modal
		jumlah investor berskala nasional (PMA)	jumlah investor		Jumlah Investor PMA	Bidang Penanaman Modal
		Jumlah Nilai investasi (PMDN)	Rp		Jumlah Nilai Investasi PMDN (Rp)	Bidang Penanaman Modal
		Jumlah Nilai investasi (PMA)	\$		Jumlah Investasi PMA (\$)	Bidang Penanaman Modal
		Jumlah Peraturan yang mendukung iklim investasi	Peraturan			Bidang Penanaman Modal
5	meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi perijinan	Jumlah PAD dari Retribusi Perizinan	Rp		Jumlah PAD Perijinan (Rp)	Bidang Perijinan
		Nilai IKM	persen		(Total nilai persepsi perunsur / Total unsur yang terisi )x nilai penimbang	Bidang Perijinan



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	meningkatnya kompetensi pencari kerja	persentase jumlah pencari kerja yang di latih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	8.33
2	meningkatnya jumlah pencari kerja yang	persentase pencari kerja yang ditempatkan	17.6



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Mendapatkan fasilitas penempatan		
3	meningkatnya jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	70
4	Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing	jumlah investor berskala nasional (PMDN)	12
		jumlah investor berskala nasional (PMA)	12
		Jumlah Nilai investasi (PMDN)	922.279.000.000
		Jumlah Nilai investasi (PMA)	340.054.000
		Jumlah Peraturan yang mendukung iklim investasi	0
5	meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi perijinan	Jumlah PAD dari Retribusi Perizinan	3.202.000.000
		Nilai IKM	79

#### D. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 10.035.953.626,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 12.840.270.276,00. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 7.814.285.22,00 dan Belanja Langsung Rp. 5.025.985.050,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.11.880.492.067,00 (92,53%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp.7.034.688.988,00,- (.90,02 %) belanja langsung sebesar Rp. 4.845.803.079,00 (96,41%).



**Tabel 2.4**  
**Anggaran Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu Tahun 2018**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	7.814.285.226,00	7.034.688.988,00	90,02
2.	Belanja Langsung	5.025.985.050,00	4.845.803.079,00	96,41
	Jumlah	12.840.270.276,00	11.880.492.067,00	92,53



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun LKIP tahun 2017 dan telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah, dimana Dinas Penanaman Modal. Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai sebesar **68,70** yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja dengan akumulasi penilaian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP**

No.	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2017
1	Perencanaan Kinerja	30	24,25
2	Pengukuran Kinerja	25	15,00
3	Pelaporan Kinerja	15	10,42
4	Evaluasi Internal	10	6,85
5	Capaian Kinerja	20	12,19
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	100	68,70

Terhadap evaluasi tersebut Inspektorat Daerah memberikan rekomendasi Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai berikut :



**Tabel 3.2**  
**Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Melakukan perbaikan implementasi dokumen RKT	Telah ditindaklanjuti	Terlampir
2.	Melakukan perbaikan kualitas pengukuran kinerja	Telah ditindaklanjuti	Terlampir
3.	Melakukan perbaikan implementasi pengukuran	Telah ditindaklanjuti	Terlampir
4.	Melakukan perbaikan pemanfaatan informasi kinerja	Telah ditindaklanjuti	Terlampir
5.	Melakukan perbaikan kualitas evaluasi	Telah ditindaklanjuti	Terlampir

### **B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:





**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	persentase jumlah pencari kerja yang di latih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	persen	8.33	6.33	75.99
2	persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen	17.6	15.31	86.98
3	persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	persen	70	55.55	79.36
4	jumlah investor berskala nasional (PMDN)	jumlah investor	12	15	125.00
5	jumlah investor berskala nasional (PMA)	jumlah investor	12	10	83.33
6	Jumlah Nilai investasi (PMDN)	Rp	922.279.000.000	5.955.705.469.509.25	645.76
7	Jumlah Nilai investasi (PMA)	\$	340.054.000	188.092.404.44	55.31
8	Jumlah Peraturan yang mendukung iklim investasi	Peraturan	0		
9	Jumlah PAD dari Retribusi Perizinan	Rp	3.202.000.000	1.605.824.103	50.15
10	Nilai IKM	persen	79	81.04	102.58

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator jumlah investor berskala nasional (PMDN), dengan capaian kinerja



125%, pada indikator Jumlah Nilai investasi (PMDN), dengan capaian kinerja 645.76 %, pada indikator Nilai IKM, dengan capaian kinerja 102.58%

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator persentase jumlah pencari kerja yang di latih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar, dengan capaian kinerja 75.99 %, pada indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan, dengan capaian kinerja 86.98%, pada indikator persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama, dengan capaian kinerja 79.36%, pada indikator jumlah investor berskala nasional (PMA), dengan capaian kinerja 83.33%, pada indikator Jumlah Nilai investasi (PMA), dengan capaian kinerja 55.31%, pada indikator Jumlah PAD dari Retribusi Perizinan, dengan capaian kinerja 50.15 %.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dalam kerangka triwulan ditunjukkan oleh tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	%	8,33	Triwulan I	2,08	-	-
					Triwulan II	2,08	22,04	1.059
					Triwulan III	2,08	4,55	218,75
					Triwulan IV	2,09	1,03	49,28
2.	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitas penempatan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	17,6	Triwulan I	4,4	1,88	42,72
					Triwulan II	4,4	15,24	346,36
					Triwulan III	4,4	11,40	259,09
					Triwulan IV	4,4	36,86	837,72



Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya jumlah penyelesaian perselisihan industrial dengan perjanjian bersama	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan ndustrial dengan perjanjian bersama	%	70	Triwulan I	17,5	100	571,42
					Triwulan II	17,5	80	457,14
					Triwulan III	17,5	37,5	214,28
					Triwulan IV	17,5	-	-
4.	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi di Bontang	Jumlah Investor (PMDN)	Investor	12	Triwulan I	3	3	100
					Triwulan II	3	6	200
					Triwulan III	3	8	266,66
					Triwulan IV	3	6	200
		Jumlah Investor (PMA)	Investor	12	Triwulan I	3	7	233,33
					Triwulan II	3	5	166,66
					Triwulan III	3	7	233,33
					Triwulan IV	3	8	266,66
		Jumlah nilai PMDN Rp x (000.000)	Rp.	922.279	Triwulan I	230.569,75	448.030	194,31
					Triwulan II	230.569,75	4.956.403	2.149,63
					Triwulan III	230.569,75	448.286	194,42
					Triwulan IV	230.569,75	102.984	44,66
		Jumlah Nilai PMA \$ x (000)	\$	340.054	Triwulan I	85.013,5	25.659	30,18
					Triwulan II	85.013,5	26.585	31,27
					Triwulan III	85.013,5	25.122.	29,55
					Triwulan IV	85.013,5	110.724	130,24
		Jumlah peraturan yang mendukung investasi	perda		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
5.	Meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari Retribusi Perijinan	Jumlah PAD dari retribusi perijinan Rp.x (000.000)	Rp.	3.202	Triwulan I	800,5	984	122,92
					Triwulan II	800,5	188	23,48
					Triwulan III	800,5	169	21,11
					Triwulan IV	800,5	262	32,72
		IKM	poin	79	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	79	81,04	102,58



### C. Analisis Capaian Kinerja

Pada bagian ini akan menguraikan analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per sasaran strategis.

<b>Sasaran 1</b>
meningkatnya kompetensi pencari kerja

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja DPMTKPTSP tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	persentase jumlah pencari kerja yang di latih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	persen	8.33	6.33	75.99

Capaian persentase jumlah pencari kerja yang dilatih pada tahun 2018 belum bisa memenuhi target yang telah direncanakan yaitu hanya mencapai 75,99% dikarenakan kurangnya alokasi anggaran dari APBD untuk mengadakan pelatihan aupun pemagangan bagi pencari kerja terdaftar. Pelatihan yang diselenggarakan menggunakan dana dari APBN melalui paket pelatihan dan pemagangan dari Provinsi dan dana APBD Perubahan.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018 7 (6-5/5*100%)
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1.	persentase jumlah pencari kerja yang di latih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	%	7,20	4,19	6,33	51,07



Persentase jumlah pencari kerja yang dilatih pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 51,07% dari realisasi tahun 2017, hal ini disebabkan adanya paket pelatihan dan pemagangan dari Provinsi yang menggunakan dana APBN pada triwulan II dan III serta dana dari APBD Perubahan pada triwulan IV.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi 2018 dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	persentase jumlah pencari kerja yang di latih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	%	24,96	6,33	25,36%

Capaian di tahun 2018 terhadap target akhir Renstra mencapai 6,33 % diharapkan secara bertahap Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target adalah belum optimalnya peran Pemerintah Kota Bontang melalui alokasi anggaran yang memfasilitasi peningkatan kompetensi pencari kerja untuk bisa mengakomodir kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan yang ada di Kota Bontang. Sebagai salah satu urusan wajib yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota, hendaknya tidak hanya bergantung pada alokasi dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN namun didukung dengan alokasi anggaran yang maksimal dari APBD Kota Bontang.



**Tabel 3.8**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	% Capaian rKinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya kompetensi Pencari Kerja	75,59	92	-16,41

**Sasaran 2**

meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitasi penempatan

**Tabel 3.9**  
**Capaian Indikator Kinerja DPMTKPTSP tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen	17,6	15,3	86,93

Capaian persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2018 sebesar 15,3% belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 17,6% hal ini dikarenakan besarnya jumlah pendaftar kartu kuning tidak melaporkan penempatan dan melakukan pengembalian kartu kuning ke DPMTKPTSP sehingga terjadi ketimpangan data.

Solusi dari permasalahan tersebut telah diberikan arahan kepada para pendaftar dan pembuat kartu kuning serta perusahaan yang membuka lowongan kerja di DPMTKPTSP untuk melaporkan pencari kerja yang diterima dan atau pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan.



**Tabel 4.1**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018 7 (6-5/5*100%)
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	21,75	15,60	15,3	-1,92

Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan pencari kerja terdaftar pada tahun 2018 mencapai 15,3% mengalami penurunan dibanding realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 15,60%.

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan Realisasi 2018 dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	20,4	15,3	75

Pada tahun 2018 sasaran meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitasi penempatan mencapai 75% dari target akhir renstra.

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	% Capaian rKinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1.	Jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan	86,93	Tidak ada alokasi anggaran	86,93

Dengan tidak adanya alokasi anggaran di APBD maka tingkat efisiensi sesuai dengan capaian kinerja yang berhasil diraih.





**Sasaran 3**

meningkatnya jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama

**Tabel 4.4**  
**Capaian Indikator Kinerja DPMTKPTSP tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	persen	70	55,55	79,36

Pada tahun 2018 tercatat 10 kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dan 8 Kasus dengan anjuran. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama pada tahun 2018 mencapai 55,55% belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 70%, karena setiap kasus mempunyai karakteristik subyek dan obyek masalah yang berbeda, sehingga penyelesaiannya tergantung pada kesepakatan yang bersengketa.

Untuk mengatasi hal tersebut dalam melakukan mediasi penyelesaian atas perselisihan antara perusahaan dengan pekerjanya diarahkan menggunakan perjanjian bersama.

**Tabel 4.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018 7 (6-5/5*100%)
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	%	85	70	55,55	-20,6



Dengan realisasi tahun 2017 sebesar 70% maka dibanding dengan tahun 2018 realisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama mengalami penurunan sebesar 55,55%.

**Tabel 4.6**  
**Perbandingan Realisasi 2018 dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	%	90	55,55	61,72

Pencapaian realisasi tahun 2018 untuk sasaran meningkatnya jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama sebesar 61,72% dari target akhir Renstra.

**Tabel 4.7**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	% Capaian rKinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya jumlah penyelesaian perselisihan hubungan perjanjian bersama	79,36	91,19	-11,83



**Sasaran 4**

Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing

**Tabel 4.8**  
**Capaian Indikator Kinerja DPMTKPTSP tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	12	15	125.00
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Investor	12	10	83.33
3	Jumlah Nilai investasi (PMDN) Rpx(000.000)	Rp	922.279	5.955.705	645.76
4	Jumlah Nilai investasi (PMA) \$x (000)	\$	340.054.	188.092	55.31
5	Jumlah Peraturan yang mendukung iklim investasi	Perda	-	-	-

Dinamisnya perekonomian Khususnya di Kota Bontang berpengaruh pula pada realisasi investasi di Kota Bontang dengan jumlah investor yang telah melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengalami fluktuatif.

Realisasi PMDN mengalami kenaikan hingga melebihi target sebesar 645,76% hal ini disebabkan adanya proyek dalam masa konstruksi pada beberapa perusahaan ,sedangkan realisasi PMA hanya mencapai 55,31% belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan karena hanya ada satu perusahaan yang melaksanakan proyek dalam masa konstruksi.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja :

1. LKPM yang disampaikan, tidak diberikan secara lengkap dan sesuai periode oleh investor
2. Terjadinya pindah alamat kantor investor atau perubahan pengelola LKPM, alamat email dan nomor telepon tanpa pemberitahuan.



3. Keterlambatan pelaporan LKPM online yang disampaikan oleh investor kepada BKPM ( Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Solusi yang telah dilakukan adalah intensitas kegiatan pengendalian berupa pelaksanaan pembinaan, pemantauan, monitoring dan sosialisasi kepada perusahaan penanam modal.

**Tabel 4.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018 7 (6-5/5*100%)
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	9	11	15	36,36
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Investor	14	12	10	-16,66
3.	Jumlah Nilai investasi (PMDN) Rpx(000.000)	Rp	4.112.008	5.111.733	5.955.705	16,51
4	Jumlah Nilai investasi (PMA) \$x (000)	\$	235.349	531.468	188.092	-64,60
5	Jumlah Peraturan yang mendukung iklim investasi	perda	3	3	-	-

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) jumlah investor PMDN pada tahun 2018 sebanyak 15 investor dengan jumlah realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 5.955.705.469.509,25 mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.5.111.733.218.463,25.

Jumlah investor PMA pada tahun 2018 sebanyak 10 investor dengan jumlah realisasi \$188.092.404,44 mengalami penurunan realisasi dibanding tahun 2017 sebesar \$531.468.705,14.



**Tabel 5.1**  
**Perbandingan Realisasi 2018 dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	12	15	125
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Investor	13	10	76,92
3	Jumlah Nilai investasi (PMDN) Rpx(000.000)	Rp	1.129.832	5.955.705	527,13
4	Jumlah Nilai investasi (PMA) \$x (000)	\$	416.581	188.092	45,15
5	Jumlah Peraturan yang mendukung iklim investasi	perda	5	3	60

**Tabel 5.2**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1.	Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing	181,88	86,87	6,13

**Sasaran 5**

meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi perijinan

**Tabel 5.3**  
**Capaian Indikator Kinerja DPMTKPTSP tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah PAD dari Retribusi Perijinan Rp.x (000.000)	Rp	3.2020	1.605	50,15
2	Nilai IKM	poin	79	81,04	102,58



Capaian Kinerja pada Indikator jumlah PAD dari retribusi perizinan hanya mencapai 50,15 % hal ini dikarenakan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, yang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 30 Maret 2017, padahal Izin Gangguan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam jumlah PAD dari retribusi Perizinan. Capaian indikator kinerja Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atau IKM mencapai 81,04 % melampaui target yang telah ditetapkan dan menggambarkan kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dari Pemerintah Kota Bontang. Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator IKM adalah :

1. Peningkatan pelayanan publik melalui inovasi SIPERIETNIK (Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik)
2. Kecepatan dalam pelayanan perizinan meningkat sejak Penerapan Aplikasi OSS (Online Single Submission) atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.
3. Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi melalui perjanjian kerja sama antara Bank Kaltimara dengan DPMPTSP terkait pembayaran non tunai
4. Peningkatan sarana dan prasarana ruang *front office*.
5. Kualitas SDM *front office* yang semakin baik melalui pelatihan *exelant service*.



**Tabel 5.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu**  
**dan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018 7 (6-5/5*100%)
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	
1.	Jumlah PAD dari Retribusi Perizinan Rp.x (000.000)	Rp.	3.558	1.985	1.605	-19,14
2.	Nilai IKM	poin	76,39	79,97	81,04	1,34

Jumlah PAD dari retribusi Perizinan realisasi tahun 2017 Rp.1.985.393.052,51 sedangkan realisasi tahun 2018 Rp.1.605.824.103,75 mengalami penurunan sebesar 19,14%

Realisasi IKM tahun 2018 dengan nilai 81,04 naik 1,34% dari realisasi tahun 2017 dengan nilai 79,97. Pencapaian dari penilaian eksternal dari Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh tim survey STITEK tahun 2018 terhadap pelayanan publik seluruh perangkat daerah Kota Bontang, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP meraih kategori B dengan nilai 77,06.

**Tabel 5.5**  
**Perbandingan Realisasi 2018 dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah PAD dari Retribusi Perizinan Rp.x (000.000)	Rp.	4.138	1.605	38,78
2	Nilai IKM	poin	80	81,04	101,13

Capaian realisasi sasaran meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi Perizinan tahun 2018 terhadap target akhir renstra dari indikator peningkatan retribusi perizinan 38,78 5 dan IKM 101,13 %



**Tabel 5.6**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1.	Jumlah PAD dari Retribusi Perijinan Rp.x (000.000)	50,15	92,96	-42,81%
2.	IKM	81,04		

### E. Realisasi Anggaran

Total anggaran untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp.5.025.985.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.845.803.079,00 atau 96,41%

**Tabel 5.7**  
**Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	6	7	8
1.	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitas penempatan	200.000.000	183.312.500	91,65
2.	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Tidak ada alokasi anggaran dari APBD	Tidak ada alokasi anggaran dari APBD	-
3.	Meningkatnya jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	284.037.500.	259.042.136	91,19
4.	Terwujudnya iklim Penanaman modal yang berdaya saing	781.148.500	746.202.800	95,52
5.	Meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi Perizinan	3.760.799.050	3.657.245.643	97,24
	<b>TOTAL</b>	<b>5.025.985.050</b>	<b>4.845.803.079</b>	<b>96,41</b>





**Tabel 5.8**  
**Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan**

No	Program/kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>			
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	200.000.000	183.312.500.	91,65
	<b>Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</b>			
2	Lembaga Kerjasama Tripartit	142.165.000	130.816.145	92,02
3	Dewan Pengupahan Kota Bontang	141.872.500	128.225.991	90,38
	<b>Program Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</b>			
4	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	449.440.000	447.450.100.	99,55
	<b>Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi</b>			
5	Pengembangan promosi Potensi daerah	300.382.500	276.126.550	91,92
	<b>Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</b>			
6	sosialisasi kebijakan penanaman modal	31.326.000	22.626.150	72,22
	<b>Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi</b>			
7	Pemeliharaan aplikasi pelayanan dan perijinan	296.602.500.	275.710.000	92,95
	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>			
8	penyediaan jasa surat menyurat	5.498.400	5.129.500	93,29
9	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73.500.000	58.892.816	80,12
10	penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	15.700.000	15.323.400	97,60
11	penyediaan jasa kebersihan kantor	131.703.000	130.014.350	98,71
12	penyediaan alat tulis kantor	314.921.600	299.707.640	95,16
13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	191.350.160	189.835.000	99,20
14	penyediaan makanan dan minuman	101.125.000	100.551.750	99,43
15	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1.037.224.000	1.037.171.357	99,99
16	penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	591.324.000	567.201.000	95,92
	<b>program peningkatan disiplin aparatur</b>			
17	peningkatan kinerja aparatur	274.736.250	274.736.250	100
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			
18	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	311.396.000	310.637.000	99,75
19	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	345.302.140	339.660.980	98,36
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
20	Sosialisasi pelayanan perijinan	34.416.000	19.474.600	56,58
	<b>Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
21	Pendidikan dan pelatihan formal	36.000.000	33.200.000	92,22
	<b>TOTAL</b>	<b>5.025.985.050</b>	<b>4.845.803.079</b>	<b>96,41</b>



**Tabel 5.9**  
**Effisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Effisiensi	%	APBD		Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket.
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2017	3.532.945.362	3.266.861.667	266.083.695	92	7.034.688.988	3.172.103.302	7	18	7	18	
2018	5.025.985.050	4.845.803.079	180.181.971	96	4.634.228.751	3.155.781.697	11	21	11	21	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.025.985.050 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.845.803.079, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Dinas Penanaman Modal,



Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 180.181.971

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bontang.

Bontang, Januari 2019

Kepala,

**Puguh Harjanto, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP. 19790810 199802 1 001



# LAMPIRAN



**KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

Perjanjian Kinerja Walikota			Perjanjian Kinerja Eselon II			Perjanjian Kinerja Eselon III					Perjanjian Kinerja Eselon IV					Perjanjian Kinerja Non Eselon								
No	Sasaran RPJMD	Indikator Kerja	No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	No	Program (Sasaran)	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	No	Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
			1	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan PAD Dari Retribusi Perijinan	IKM	poin	1	Pelayanan administrasi perkantoran	Kelancaran administrasi kantor	%	100	Sekretaris	1	Pengyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman	lembar	600	Kasubbag. Umum	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur	jumlah dokumen, surat menyurat yang terselesaikan	surat	500	Staf Sub bagian umum
													2	Pengyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	Kasubbag. Umum	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	Staf Sub bagian umum
													3	Pengyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	28	Kasubbag. Umum	3	Terbayarnya pajak kendaraan (STNK)	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	28	Staf Sub bagian umum
													4	Pengyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan tempat kerja	tahun	1	Kasubbag. Umum	4	Pemeliharaan tempat kerja	Tersedianya peralatan kebersihan	tahun	1	Staf Sub bagian umum
																				Tersedianya jasa kebersihan	paket	1	Staf Sub bagian umum	
													5	Pengyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	jenis	64	Kasubbag. Umum	5	Tersedianya alat tulis kantor	Alat tulis kantor	jenis	64	Staf Sub bagian umum
													6	Pengyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	unit	30	Kasubbag. Umum	6	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	30	Staf Sub bagian umum
													7	Pengyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman tamu yang tersedia	tahun	1	Kasubbag. Umum	7	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Makanan dan Minuman tamu yang tersedia	tahun	1	Staf Sub bagian umum

											8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan selama setahun	Kali	75	Kasubbag. Umum	8	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat dalam pelayanan publik, teknologi informasi dan investasi	Jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan selama setahun	kali	75	Staf Sub bagian umum		
											9	Pengediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS yang tersedia	orang	24	Kasubbag. Umum	9	Meningkatnya pelayanan publik	Jumlah tenaga non PNS yang tersedia	orang	24	Staf Sub bagian umum		
						2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		%	100	Sekretaris	10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	28	Kasubbag. Umum	10	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	unit	28	Staf Sub bagian umum	
												11	Pemeliharaan rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor yang terpelihara	tahun	1	Kasubbag. Umum	11	terpeliharanya perlengkapan kantor dan gedung kantor	perlengkapan kantor yang terpelihara	tahun	1	Staf Sub bagian umum	
						3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur PNS	%	100	Sekretaris	12	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang meningkat kinerjanya	orang	54	Kasubbag. Umum	12	Meningkatnya kinerja aparatur PNS	Jumlah ASN yang meningkat	orang	54	Staf Sub bagian umum	
						4	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pengetahuan aparatur	%	100	Sekretaris	13	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kompetensi aparatur	orang	20	Kasubbag. Umum	13	terlaksananya diklat aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur	orang	20	Staf Sub bagian umum	
					Jumlah PAD dari retribusi perijinan	Rp. (000.000 )	5	Optimalisasi pemanfaatan teknologi	Prosentase Pemanfaatan teknologi informasi	%	100	Kabid penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan	14	Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan	Jumlah aplikasi yang tersedia	aplikasi	2	Kasi Pengaduan, Pengendalian, Data dan Pelaporan	14	Terpeliharanya aplikasi pelayanan dan perijinan	jumlah aplikasi yang terpelihara	aplikasi	2	Staf pengolahan data (fungsional)
							6	peningkatan pelayanan perijinan	Penyampaian informasi tentang proses pelayanan perijinan kepada masyarakat	%	100	Kabid penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan	15	Sosialisasi pelayanan perijinan	jumlah peserta sosialisai	peserta	80	Kasi pelayanan perijinan dan non perijinan dasar	15	Terlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan	jumlah peserta sosialisasi	peserta	80	Staf pelayanan perijinan dan non perijinan dasar



			2	Meningkatnya jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	%	7	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	%	100	Kabid Hubungan Industrial	16	Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan	Rekomendasi	2	Kasi Pengupahan dan persyaratan kerja	16	Tersusunnya pendapat, saran, kebijakan ketenagakerjaan dan penyelesaian sejumlah masalah ketenagakerjaan	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan	Rekomendasi	2	Staf Pengupahan dan persyaratan kerja
													17	Dewan Pengupahan Kota Bontang	jumlah saran dan pertimbangan	saran & pertimbangan pengupahan dan UMK	2	Kasi Pengupahan dan persyaratan kerja	17	Terlaksananya sidang Depeko, Sosialisasi UMK/UMSK dan tersusunnya rekomendasi kebijakan pengupahan kota bontang	jumlah saran dan pertimbangan	saran & pertimbangan pengupahan dan UMK	2	Staf Pengupahan dan persyaratan kerja
			3	Meningkatnya Jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitas penempatan	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%																		
			4	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja	%	8	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang dilatih	%	100	Kabid. Pelatihan, produktivitas, dan penempatan tenaga kerja	18	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	jumlah pencari kerja yang dilatih	orang	25	kasi. Pelatihan, produktivitas dan pemagangan	18	Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja	jumlah pencari kerja yang dilatih	orang	25	staf Pelatihan, produktivitas dan pemagangan
			5	Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah investor	9	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	persentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	%	100	Kabid. Penanaman modal	19	Pengembangan Promosi Potensi daerah	Jumlah event pameran yang diikuti	event	3	kasi. Promosi dan fasilitasi penanaman modal	19	Terlaksananya kegiatan pameran	Jumlah event pameran yang diikuti	event	3	staf Promosi dan fasilitasi penanaman modal
					Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Jumlah investor							20	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah peserta sosialisasi	peserta	50	kasi. Data, sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	20	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal	Jumlah peserta sosialisasi	peserta	50	staf Data, sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

				Jumlah nilai berskala nasional (PMDN) Rp.:(000.000.-)	Rp.	10	Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	%	100	Kabid. Penanaman modal	21	Pelaksanaan Pameran Bangunan	pameran pembangunan yang dilaksanakan	pameran	1	kasi. Promosi dan fasilitasi penanaman modal	21	Terlaksananya Pameran Bangunan	jumlah pameran pembangunan yang dilaksanakan	pameran	1	staf Promosi dan fasilitasi penanaman modal
				Jumlah nilai berskala nasional (PMA) \$:.(000.-)	\$																		
				Jumlah peraturan yang mendukung iklim investasi																			

Mengetahui  
Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontar



**PUGUH HARJANTO SSTP., M.Si**

Pembina (I/IIa)  
NIP. 19790810 199802 1 001

KERTAS KERJA LKIP DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2018

No	Misi	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran Kinerja	INDIKATOR SASARAN	Salinan	Target	Realisasi Kinerja 2018					Cara Pengukuran	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Program dan Kegiatan	Rancangan				Bidang Pemasangan Jumlah	Formasi Ikuwal Kekuasaan	Salinan (Masa)	Program dan Kegiatan Lain (Masa)	SDG (Masa)	Peningkatan (Masa)									
								TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	X Capaian				Page Awal	Page Perbaikan	Realisasi	%															
1		1. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan Perijinan dan Pemasangan Modal	Nilai IKM	1. Meningkatkan Mutu Pelayanan dan PAD dari Relikasi Perizinan	Peningkatan PAD dari relikasi perijinan Rp. (Rp. 100.000.000,-)  IKM	Rapik  Paia	3,282	384	1,173	1,343	1,635	58.12		<b>Terpenuhinya kebutuhan kantor</b>  Terpenuhinya Kebutuhan Material dan pengiriman Jasa Surat Terbayarnya rekening jasa komunikasi, rumber daya air dan listrik Terbayarnya pajak kendaraan dinar/aperasional Terwujudnya keberhahan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor  Terpenuhinya kebutuhan konsumsi tamu dan peserta rapat Terwujudnya pengetahuan dan penyamaan persepsi aparat dalam pelayanan publik dan inventari Tersedianya jasa administrasi teknik  <b>Tersedianya sarana dan prasarana yang siap pakai</b>  Terpeliharanya kendaraan dinar/aperasional  Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor  <b>Pemanfaatan teknologi secara optimal</b>  Terpeliharanya aplikasi pelayanan perijinan dan tenaga kerja  <b>Mempercepat layanan pengurusan perijinan</b>  Terlaksananya sosialisasi mengenai perijinan  <b>Meningkatnya disiplin operator</b>  Meningkatnya Kinerja Aparatur PNS	Program Pelayanan Administrasi - Penyediaan Jasa Surat Penyediaan jasa komunikasi, rumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Penyediaan Jasa penyediaan alat tulis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinari dan kanrultari luar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi  <b>Program peningkatan sarana dan prasarana</b>  Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinar/aperasional  Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  <b>Program Optimalisasi Pemanfaatan</b>  Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan  <b>Program Peningkatan Kualitas</b> Sosialisari pelayanan perijinan  <b>Program Peningkatan Disiplin</b>  Peningkatan Kinerja	3,000,400.00 73,500,000.00 15,700,000.00 120,333,000.00 155,233,500.00 73,445,100.00 57,370,000.00 455,377,500.00 474,000,000.00  252,375,000.00 102,144,140.00  351,660,000  0  318,667,500	5,450,400.00 73,500,000.00 15,700,000.00 131,703,000.00 314,324,500.00 131,350,100.00 184,425,000.00 1,837,224,000.00 531,324,000.00  314,324,500.00 345,382,140.00  296,602,500  34,416,000  274,736,250	5,123,500.00 50,832,816.00 15,323,400.00 130,814,350.00 233,787,540.00 183,835,000.00 180,554,750.00 800,000,000.00 557,284,000.00  318,667,500 333,600,000.00  275,710,000  19,474,600  *****	33.23 88.13 37.00 38.72 35.47 33.21 33.43 33.33 33.32  33.75 38.37  32.36  56.33  100.00	Sekretariat														

No	Misi	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran Kinerja	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Target	Realisasi Kinerja 2018					Cara Pengukuran	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Program dan Kegiatan	Rencana				Bidang Pemasangan yang Jumlah	Permanen atau Tidak	Salinan /Bentuk	Penerapan	SDGs (G1-G17)	Pengaruh (G1-G17)		
								2018	2019	2020	2021	2022				X Capaian	Pagu Awal	Pagu Perubahan	Realisasi							%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		2. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah investor	Meningkatkan iklim investasi dan Realisasi investasi di Kota Bandung	Jumlah investor (PMH)	Investor	12	3	5	8	15	125X	Desain dan pengembangan aplikasi	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	30.000.000	30.200.000	32.22	Sekretariat									
					Jumlah investor (PMR)	Investor	12	7	5	7	18	85X	Desain dan pengembangan aplikasi	Program Pengembangan Prasarana dan Ketersediaan Investasi	300.000.000	276.426.500	92.12	Ditjen Perencanaan Madat									
					Jumlah nilai (PMH) Rp.(000.000,-)	Rupiah	322.273	448.850	5.484.453	5.852.719	5.335.783	658X	Desain dan pengembangan aplikasi	Program Pengembangan Iklim Investasi													
					Jumlah nilai (PMR) Rp.(000,-)	Rupiah	348.854	25.653	52.244	77.366	188.850	55X	Desain dan pengembangan aplikasi	Program Pengembangan Iklim Investasi	34.026.000	22.626.450	72.23	Ditjen Perencanaan Madat									
					Jumlah produsen yang melakukan investasi	Produsen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Desain dan pengembangan aplikasi	Program Pengembangan Iklim Investasi	250.000.000	280.000.000	95.60	Ditjen Perencanaan Madat					
2	Meningkatkan Kualitas Daya Saing Melalui Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	4. Peningkatan kompetensi dan keahlian pelayanan pemerintah	Jumlah Pemasangan Kerja yang Ditambah dan Ditempatkan	4. Meningkatkan kompetensi pelayanan pemerintah	Pemasangan Kerja yang Ditambah dan Ditempatkan	X	8.33	8.00	9.50	7.00	6.33	75.33X	Desain dan pengembangan aplikasi	Program Pengembangan Kompetensi dan Produktivitas	200.000.000	183.510.500	91.75	Ditjen Perencanaan Madat									
					Pemasangan Kerja yang Ditempatkan	X	97.6	6.00	7.7	7.34	15.3	86.33X	Desain dan pengembangan aplikasi	Program Pengembangan Kompetensi dan Produktivitas													

No	Misi	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Sasaran Kinerja	INDIKATOR SASARAN	Salinan	Target	Realisasi Kinerja 2018					Cara Pengukuran	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Program dan Kegiatan	Rancangan				Dibang Pening yang jumlah	Perman alahat/ Keberk aulan	Salinan JHPS	Pening = Produk any	SDG- [101a Adal]	Pening anyan [101a Adal]		
								TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	X Capaian				Pagu Awal	Pagu Perakaban	Realisasi	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13				14	15	16	17	18	19		
		5 Meningkatkan Sistem Hubungan Industrial yang Harmonis & Berkeadilan	Meningkatkan jumlah penyelesaian Hubungan Industrial dengan Penyelesaian Persama	1 Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial dan Hubungan	1 Penurunan Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial dengan Penyelesaian	X	70	100	87.5	82.5	55.55	79.36X		Penurunan Cabang Pelanggaran dan Kekabijakan Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Kesejahteraan												
													Rekomendasi Kesejahteraan	Lembaga Kesejahteraan Tripartit		82,557,000	149,236,500	154,861,000	83.73		Didang Hubungan Industrial						
													Usulan peningkatan KHL dan UMK	Daerah Pengapakan Kala Daalang		85,214,500	151,856,500	155,387,500	87.77		Didang Hubungan Industrial						

Mengetahui  
Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu



**PUGUH HARJANTO, SSTP., M.Si**  
NIP. 19790810 199802 1 001

